

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, M. (2021). *Pertanggungjawaban pidana dan alasan penghapusan pidana dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Chazawi, A. (2007). Pelajaran hukum pidana 1. PT. Raja Grafindo.
- Danim, S. (2012). Pengembangan profesi guru. Kencana.
- Estede, S., Saputra, E., Saragih, M. W., & Ansor, M. (2025). Hak asasi manusia di tengah polarisasi sosial. Star Digital Publishing.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2004). Hukum acara pidana Indonesia (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Herlambang, Y. T. (2021). Pedagogik: Telaah kritis ilmu pendidikan dalam multiperspektif. Bumi Aksara.
- Ibrahim, J. (2012). Teori & metodologi penelitian hukum normatif. Bayu Media Publishing.
- Mahfuddin, A. (2013). Profesionalisme jabatan guru di era globalisasi. Rizqi Press.
- Manullang, H. (2023). *Reformulasi alasan penghapusan pidana korporasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi*. Medan: Lemkomindo.
- Octavia, S. A. (2020). Sikap dan kinerja guru profesional. Deepublish.
- Saputra, A. M. A., et al. (2023). Pendidikan karakter di era milenial: Membangun generasi unggul dengan nilai-nilai positif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Soetjipto, & Kosasi, R. (2004). Profesi keguruan. Rineka Cipta.
- Sunggono, B. (2003). Metodologi penelitian hukum. Raja Grafindo Persada.
- Tri Andrisman. (2009). Hukum pidana, asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia. Universitas Lampung.

JURNAL

- Adryani, V., & Kansil, C. S. T. (2020). Perlindungan hukum merek terkenal terhadap pengaturan prinsip persamaan pada pokoknya yang diajukan dengan itikad tidak baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 92K/Pdt. Sus-HKI/2017). Jurnal Hukum Adigama, 3(2), 875.

- Ardiansyah, A. E. (2019). *Perlindungan hukum terhadap guru dalam tindakan disipliner terhadap peserta didik* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Arna, M. A. S. (2018). Perlindungan hukum dan profesi guru (Kajian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). *Wahana Chitta Jurnal Pendidikan*, 1(1), 28–30.
- Danim, S. (2012). Pengembangan profesi guru. Kencana.
- Dwizhafira, D. (2018). Penegakan hukum bagi guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di sekolah. *Diponegoro Law Journal*, 7(4), 422–423.
- Hafni Sahir, S. (2021). Metodologi penelitian. Penerbit KBM Indonesia.
- Hidayat, & Hilalludin. (2024). Hak kewajiban dan tanggung jawab guru dalam pendidikan Indonesia. *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, 2(3), 180.
- Inanna. (2018). Peran pendidikan dalam membangun karakter bangsa yang bermoral. *Jekpend: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), 28.
- Karang, I. G. N. A. B., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan (Child Abuse) di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 353.
- LAITUPA, I. S. (2024). Peran lembaga bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keadilan (Studi kasus: LBH Walabi Merauke) [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi hukum penanganan tindak pidana kekerasan di lingkungan pendidikan dalam upaya perlindungan profesi guru. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 191–207.
- Marlina. (2014). Punishment dalam dunia pendidikan dan tindak pidana kekerasan. *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 50.
- Nawawi, J. (2019). Perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), 163–164.
- Ningrum Siburian, T. D., et al. (2024). Pelanggaran kode etik guru studi kasus: Guru honorer SD cabuli siswinya di toilet sekolah. *Jurnal Pendidikan Kreativitas Pembelajaran*, 6(3), 472.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 765.
- Saerang, E., & Pongkorung, F. (2024). Pidanaan perbuatan kekerasan terhadap anak menurut Pasal 80 Ayat (1) Jo 76c UU No. 35 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 12(4), 2.
- Siburian, T. D. N., et al. (2024). Pelanggaran kode etik guru studi kasus: Guru honorer SD cabuli siswinya di toilet sekolah. *Jurnal Pendidikan Kreativitas Pembelajaran*, 6(3), 472.

- Silahunudin. (2017). Urgensi membangun karakter anak sejak usia dini. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 17.
- Supriatna, M. A. (2018). Perlindungan hukum dan profesi guru. *Wahana Chitta Jurnal Pendidikan*, 1(1), 28–30.
- Theresia, C. J. (2023). Sanksi bagi guru sebagai pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap siswa pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Lex Privatum*, 12(1), 5.

PERUNDANG - UNDANGAN

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 1554 K/PID/2013 tanggal 6 Mei 2014 tentang perkara pidana atas nama Aop Saopudin, guru di Majalengka*. Jakarta: Mahkamah Agung RI